

BAB V

PEMBAHASAN

Analisa Motif Jepang Dalam Mengalokasikan *Official Development Assistance* (ODA) Terhadap Indonesia tahun 2008-2010

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai analisa motif Jepang Jepang Dalam Mengalokasikan *Official Development Assistance* (ODA) Terhadap Indonesia tahun 2008-2010. Penjelasan dan analisa yang dilakukan pada bab ini menggunakan teori *Aid Allocation* milik Maria Anderson. Pengaplikasian teori yang dimaksudkan adalah dengan mengkonfirmasi setiap indikator dari setiap variabel yang Anderson sebutkan dan mengkaitkannya dengan bantuan ODA Jepang ke Indonesia tahun 2008 – 2010. Pada akhirnya nanti dapat dilihat apakah teori yang di buat oleh Anderson relevan dengan kasus ini atau tidak.

Bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang sering digunakan negara – negara maju untuk mengakomodasi kepentingannya. Dalam hal ini Jepang merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberikan bantuan luar negeri. Bantuan yang diberikan Jepang sebagian besar berfokus pada negara – negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika. Indonesia merupakan negara yang mendapat bantuan luar negeri Jepang atau juga biasa disebut dengan ODA. Bantuan ODA yang diberikan Jepang ke Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2008 – 2010. Pada sub bab ini penulis akan menganalisa motif – motif bantuan luar Jepang ke *MRBCs*

menggunakan Konsep *Aid Allocation* yang di formulasikan oleh Maria Anderson, yakni motif *humanitarian, economic, ideology, strategic, identity* dan *environment*.

5.1 *Humanitarian Motive*

Humanitarian Motive adalah motif – motif kemanusiaan yang ada pada bantuan luar negeri. Di sini penulis meneliti mengenai ada atau tidaknya motif kemanusiaan yang muncul pada bantuan ODA Jepang ke Indonesia Tahun 2008 – 2010. terdapat dua indicator dalam menganalisa motif yakni *reducing poverty* dan *showing compassion*.

5.1.1 *Reduction Poverty*

Kemiskinan merupakan masalah utama sebagian besar negara – negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika. Masalah kemiskinan ini merupakan awal dari berbagai masalah lainnya. Melihat hal tersebut, negara – negara maju memberikan bantuan kepada negara – negara yang membutuhkannya.

Dalam memberikan bantuan luar negeri, motif kemanusiaan adalah salah satu motif yang sering muncul. Jepang merupakan salah satu negara yang sering memberikan bantuan luar negeri dengan motif kemanusiaan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan Jepang ke Indonesia tahun 2008 – 2010 diyakini mengandung motif kemanusiaan. Motif kemanusiaan tersebut dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya indikator *Reduction Poverty*. Konfirmasi indikator ini dilihat dari upaya Jepang untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Upaya tersebut terealisasi menjadi program – program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana muncul ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti kualitas pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan masalah – masalah lainnya. Saat ini kemiskinan sering terjadi di negara – negara berkembang. Perekonomian yang belum stabil dan merata membuat negara berkembang menjadi negara yang “akrab” dengan kemiskinan, termasuk Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), data ini menunjukkan jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode 2008 sampai 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami pengurangan sebesar 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan mengalami pengurangan sebesar 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2009 sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan.¹⁰⁰ Pengurangan tingkat kemiskinan tersebut tentunya dikarenakan oleh banyak faktor termasuk bantuan luar negeri, khususnya Jepang.

Jepang merubakan negara yang konsisten memberikan bantuan ke Indonesia. Bantuan ODA Jepang meliputi bantuan sektor lingkungan, ekonomi, sosial dan

¹⁰⁰ “Badan Pusat Statistik” diakses dari <http://www.bps.go.id/index.php/brs/767> pada 17 Desember 2016

lainnya. Jepang juga berkomitmen untuk memberikan bantuan yang bertujuan mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tujuan ini tercantum dalam ODA Charter yang berbunyi:

*“Poverty reduction is a key development goal shared by the international community, and is also essential for eliminating terrorism and other causes of instability in the world. Therefore, Japan will give high priorities to providing assistance to such sectors as education, health care and welfare, water and sanitation and agriculture, and will support human and social development in the developing countries. At the same time, sustainable economic growth, increase in employment, and improvement in the quality of life are indispensable for realizing poverty reduction and Japan places importance on providing assistance for these issues accordingly”.*¹⁰¹

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Jepang telah memberikan program berupa proyek untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu pertama, *Fourth Development Policy Loan* pada tahun 2008 merupakan bentuk pinjaman sebesar kurang lebih US\$ 200 juta terhadap Indonesia untuk pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Bantuan ini berbentuk kerjasama keuangan. Bantuan ini difokuskan pada reformasi ekonomi dan fiskal termasuk peningkatan iklim investasi dan pengentasan kemiskinan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Jepang terhadap Indonesia.¹⁰²

Kedua, *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project* pada tahun 2008 merupakan salah satu bagian dari ODA Jepang terhadap Indonesia yang bertujuan untuk merehabilitasi irigasi pengairan di enam provinsi

¹⁰¹ “ODA Charter” diakses dari www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf pada 17 Desember 2016

¹⁰² “Pertukaran Nota Fourth Development Policy dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah RI” diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertukaran-Nota-Fourth-Development-Policy-Loan-dari-Pemerintah-Jepang-kepada-Pemerintah-RI.aspx> pada 6 Februari 2017

yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan oleh *The Asian Development Bank (ADB)*.¹⁰³

Ketiga, *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Easter Region of Indonesia* pada tahun 2008 merupakan, salah satu bantuan dari ODA Jepang yang merupakan kelanjutan dari program serupa yang dimulai pada tahun 2004 dan di perbarui pada tahun 2008. Program ini diperuntukan demi terjaminnya pangan di wilayah Indonesia tengah sampai Indonesia timur. Dengan memperbaiki sistem irigasi di pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.¹⁰⁴

Ke empat yaitu, *Fifth Development Policy Loan* pada tahun 2009 merupakan bentuk pinjaman sebesar kurang lebih US\$ 200 juta terhadap Indonesia untuk pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Bantuan ini berbentuk kerjasama kerjasama keuangan. Bantuan ini difokuskan pada reformasi ekonomi dan fiskal termasuk peningkatan iklim investasi dan pengentasan kemiskinan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Jepang terhadap Indonesia.¹⁰⁵

Kelima, *The Project for Construction of Bridges in the Province of Nusa Tenggara Barat Phase II* pada tahun 2009 yang merupakan program bantuan hibah dalam ODA Jepang yang ditujukan untuk pembangunan di provinsi Nusa Tenggara

¹⁰³ Asian Development Bank, *Indonesia :Participatory Irrigation Sector Project, 2014*. Hal 13

¹⁰⁴ "Ex-Post Evaluation of Japanese ODA Loan" diakses dari https://www2.jica.go.jp/en/evaluation/pdf/2014_IP-509_4.pdf . hal 1. Pada 6 Februari 2017.

¹⁰⁵ "Pertukaran Nota Fourth Development Policy dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah RI" diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertukaran-Nota-Fourth-Development-Policy-Loan-dari-Pemerintah-Jepang-kepada-Pemerintah-RI.aspx> pada 6 Februari 2017

Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi termiskin di wilayah Indonesia, oleh karena itu Jepang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan di provinsi NTB dengan membangun jembatan untuk menghubungkan jalur selatan provinsi tersebut demi pertumbuhan ekonomi pada wilayah NTB.¹⁰⁶

Ke enam, *The Food Security Project for Underprivileged Farmers* pada tahun 2010. Program ini merupakan bantuan hibah dalam ODA Jepang terhadap Indonesia yang bertujuan untuk membantu stabilitas pangan di Indonesia melalui petani di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu petani melalui pemerintah Indonesia untuk menyediakan pupuk berkualitas tinggi bagi petani miskin dalam meningkatkan pendapatannya.¹⁰⁷

Melihat program tersebut, bisa dilihat bahwa bantuan ODA ke Indonesia memiliki kaitannya dengan keinginan Jepang mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Telah disebutkan bahwa relevansi indikator *poverty reduction* adalah adanya program atau proyek Jepang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program dan proyek Jepang dalam rangka mengurangi kemiskinan tersebut tidak hanya bantuan berbentuk tunai yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, tetapi sebagian besar berbentuk program yang mampu membantu masyarakat miskin mampu memperbaiki dan mengembangkan ekonominya sendiri. Sehingga dengan melihat program dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan indikator *poverty reduction* terpenuhi.

¹⁰⁶ "Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) Untuk Indonesia" diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html pada 18 Februari 2017

¹⁰⁷ "Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) untuk Indonesia" diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html pada 17 Desember 2016

5.1.2 *Showing Compassion*

Kepedulian merupakan salah satu unsur yang membuat suatu tindakan dilakukan. Dalam dunia internasional, negara-negara saling menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan luar negeri ataupun bantuan lainnya. Ditunjukkannya kepedulian dari suatu negara dapat dilihat dari pernyataan yang keluar dari pemerintahan negara tersebut, biasanya kepala negara, kepala pemerintahan ataupun menteri.

Perwakilan negara biasanya memberikan pernyataan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap negara tersebut. Kepedulian ini kemudian diwujudkan dalam bantuan luar negeri. Dalam teori yang dikemukakan Anderson, *showing compassion* atau “menunjukkan kepedulian” dilihat sebagai salah satu indikator ada atau tidaknya *humanitarian motive*.

Bantuan Jepang ke Indonesia tidak hanya bersifat tindakan bantuan saja, melainkan diiringi dengan *showing compassion* yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. *Showing compassion* ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Jepang peduli dan memperhatikan hubungan bilateral mereka dengan baik dengan memberikan bantuan *The Project for Safe School Reconstruction in Devastated Area of Earthquake in Offshore of Padang in West Sumatra Region*. Salah satu *showing compassion* Jepang di tunjukkan dari pidato Perdana Menteri Shizo Abe pada tahun 2007 dalam pertemuan yang bertajuk “*Japan and One ASEAN that Care and Share at the Heart of Dynamic Asia*”

“Furthermore, we hope that Indonesia and ASEAN will join the people of Japan in taking up the challenges that Asia and the globe will be facing in the years to come. This is our hopeful request of you.

*Indonesia's noble motto *Bhinneka Tunggal Ika*, or "Unity in Diversity," may have appeared to be nothing more than a lofty and faraway goal during the early days of nationhood. In the Indonesia of the time, one can only guess how many people would have thought that these words would before long come to take on life and substance in the truest sense and spread throughout the nation's 63,000 villages.*

As chance would have it, it was exactly 50 years ago in November of 1957 that then-Prime Minister Nobusuke Kishi, my grandfather, visited Jakarta and laid the first foundations leading to today's bilateral relations. Now, standing in the same place, I seek to remember those bygone days. I am aware that at the time Indonesia was still working to create an integrated nation, in the midst of struggles accompanying the birth of the nation.

*I am particularly interested in the tradition of *gotong royong* that the people of Indonesia have maintained and its great similarities to the custom of mutual aid that has been handed down over many generations in traditional Japanese society. Japan, like Indonesia, is a country that suffers many natural disasters, including earthquakes and typhoons. When a catastrophe would strike, Japanese would as a matter of course call for reciprocal aid and extend a hand to help others overcome the crisis.*

*When I first learned that Indonesia has a social custom so similar to this called *gotong royong*, it suddenly caused me to draw one conclusion. It seems to me that, for Indonesia to bear such difficulties during nation-building and yet still be able to attain its motto of *Unity in Diversity* so laudably, it must surely be a result of this rich climate and spiritual culture of *gotong royong*, in which people care and share.*

*I would also argue that this is not limited to Indonesia, but can also be said for ASEAN as a whole”.*¹⁰⁸

Dalam pidato tersebut Abe menjelaskan kepeduliannya terhadap Indonesia.

Abe menjelaskan bagaimana Indonesia memiliki kesamaan dan kedekatan dengan

¹⁰⁸ “*Japan and One ASEAN that Care and Share at the Heart of Dynamic Asia*” diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech.html> pada 17 Desember 2016

Jepang. Dalam pidato tersebut juga disebutkan ketertarikan Abe terhadap prinsip – prinsip sosial masyarakat Indonesia. Selain pidato tersebut, Kepedulian Jepang di Indonesia juga muncul pada pidato Menteri Luar Negeri Jepang Hirofumi Nakasone.

*“I was deeply saddened to hear that Indonesia lost a large number of lives as a result of the earthquake which occurred on September 2 off the coast of West Java. I would like to offer my deepest condolences to the bereaved families. I also express my hope for the swift recovery of those who suffered from damages as well as a speedy reconstruction process. The Government of Japan is willing to provide the maximum possible aid to the victims of the earthquake”.*¹⁰⁹

Dalam pidato tersebut Nakasone menjelaskan keprihatinannya terhadap gempa bumi yang melanda Indonesia. Pemerintah Jepang juga peduli terhadap korban – korban yang terkena gempa tersebut. Selain itu dalam pidato tersebut Pemerintah Jepang menegaskan akan memberikan bantuan untuk pada korban bencana alam di Indonesia.

Tidak hanya melalui pernyataan langsung dari pemerintah Jepang terkait kepeduliannya terhadap bencana alam di Indonesia. Pada tahun 2008-2010 pemerintah Jepang juga memberikan bantuan ODA untuk membantu penyelesaian bencana alam di Indonesia, bentuk bantuan tersebut antara lain,

Pertama, *The Project for Improvement of Bridges in Nias Island*. Yang merupakan salah satu program ODA dimana Pulau Nias merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 2006 lalu dan menghilangkan dua ribu orang. Bencana tersebut tentu saja menghancurkan

¹⁰⁹ “Hirofumi Nakasone’s speech” diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/9/1195470_1142.html pada 18 September 2016

infrastruktur di wilayah tersebut. Bantuan *The Project for Improvement of Bridges in Nias Island* merupakan bantuan dalam pembangunan enam jembatan tahan gempa dan rehabilitasi jalan yang hancur karena bencana tersebut agar aktivitas perekonomian wilayah tersebut dapat berjalan kembali.¹¹⁰

Kedua, *The Project for Safe School Reconstruction in Devastated Area of Earthquake in Offshore of Padang in West Sumatra Region* yang merupakan proyek pembangunan dan perbaikan sekolah yang aman dengan memiliki fitur tahan gempa bagi sekolah dasar dan menengah yang mengalami kerusakan di kota Padang dan kabupaten Padang Pariaman. Perbaikan pada sektor pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

Dari penjelasan diatas sangat terlihat bahwa bantuan Jepang di Indonesia memiliki keinginan *showing compassion*. Pidato-pidato dan bantuan tersebut menjelaskan bagaimana Jepang secara khusus peduli terhadap kondisi Indonesia sebagai mitranya. Penjelasan ini sekaligus menekankan relevansi dari indikator *showing compassion*.

5.2 Economic Motives

Economic Motive merupakan motif motif ekonomi yang ingin diperoleh Jepang terkait bantuan ODA Jepang di Indonesia tahun 2008-2010. Dalam menjelaskan ada atau tidaknya motif ekonomi Anderson menyediakan tiga indikator,

¹¹⁰ "Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) Untuk Indonesia" diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html pada 18 Februari 2017

yakni *trade*, *investment* dan *export*. Masing – masing indikator digunakan untuk mengukur motif ekonomi yang dikejar Jepang.

Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia semakin erat dimana pada tahun 2005 terjadi kerjasama antara swasta-pemerintah Jepang dan Indonesia.¹¹¹ Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jepang merupakan mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia, memasuki tahun 2007 Jepang merupakan negara dengan investasi terbesar di Indonesia dengan angka 11.5 persen dari total investasi di Indonesia.¹¹² Pada awal pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun Indonesia mendapatkan prioritas bantuan ekonomi terbesar dari Jepang.¹¹³ Dengan melihat beberapa fakta tersebut penulis berasumsi bahwa terjadi kedekatan hubungan antara Jepang dan Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) yang didalamnya termasuk tahun 2008-2010.

Dengan melihat program program bantuan ODA Jepang terhadap Indonesia pada tahun 2008-2010 yang bersifat ekonomistik maka sangat terlihat bahwa Jepang memiliki motif ekonomi dalam bantuan ODA nya, program tersebut adalah Pertama, *Fourth Development Policy Loan* merupakan bentuk pinjaman sebesar kurang lebih US\$ 200 juta terhadap Indonesia untuk pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Bantuan ini berbentuk kerjasama keuangan. Bantuan ini

¹¹¹ “Hubungan Perekonomian Jepang-Indonesia” diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html#2 pada 25 Februari 2017

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

difokuskan pada reformasi ekonomi dan fiskal termasuk peningkatan iklim investasi dan pengentasan kemiskinan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Jepang terhadap Indonesia.¹¹⁴

Kedua, *Fifth Development Policy Loan* merupakan bentuk pinjaman sebesar kurang lebih 9.923 miliar yen terhadap Indonesia untuk pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi Jepang terhadap Indonesia.¹¹⁵ Ketiga, *Sixth Development Policy Loan* yakni, program pinjaman Yen yang dilakukan melalui kerjasama *World Bank* untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pemberian pinjaamn Yen ini bertujuan memperbaiki ekonomi makro, iklim investasi, kondisi keuangan, dan lain-lain di Indonesia.¹¹⁶

Dengan melihat program-program tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tujuan yang bersifat ekonomistik dari pemerintah Jepang terhadap Indonesia dimana program-program tersebut mengacu pada tujuan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

5.2.1 Trade

Negara-negara di dunia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara-negara tersebut saling berdagang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Perdagangan juga menjadi alah satu cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi

¹¹⁴ "Pertukaran Nota Fourth Development Policy dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah RI" diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertukaran-Nota-Fourth-Development-Policy-Loan-dari-Pemerintah-Jepang-kepada-Pemerintah-RI.aspx> pada 6 Februari 2017

¹¹⁵ "Pertukaran Nota Fourth Development Policy dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah RI" diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertukaran-Nota-Fourth-Development-Policy-Loan-dari-Pemerintah-Jepang-kepada-Pemerintah-RI.aspx> pada 6 Februari 2017

¹¹⁶ Ibid

Bantuan luar negeri sering dilihat sebagai cara suatu negara untuk meningkatkan intensitas perdagangan antara negara donor dengan negara penerima. Anderson menjelaskan bahwa dalam menganalisa motif ekonomi dalam bantuan luar negeri, *trade* merupakan salah satu indikator yang menentukan ada tidaknya motif ekonomi negara donor.

Jepang dan Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi yang baik. Hubungan ekonomi tersebut ditunjukkan dari perdagangan yang intens antara kedua negara. Perdagangan tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor dan impor antara Jepang dan Indonesia.

Tabel 4. Nilai Perdagangan antara Jepang dan Indonesia Tahun 2007 – 2010

(dalam bentuk US\$)

Tahun	Ekspor	Impor
2007	9,046,843	26,444,815
2008	12,507,904	32,293,203
2009	9,333,775	21,824,757
2010	15,859,133	28,149,461

Sumber: “*Japan External Trade Organization*” diakses dari <https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/>

Jika dilihat dari tabel diatas maka antara tahun 2008 sampai 2010 perdagangan antara Jepang dan Indonesia bisa dikatakan stabil. Namun jika diteliti bisa

dilihat pada tahun 2009 perdagangan antara kedua negara mengalami penurunan. Namun pada tahun 2010 nilai perdagangan antara Jepang dan Indonesia kembali meningkat.

Nilai perdagangan antara Jepang dan Indonesia tersebut meningkat tentunya bukan tanpa sebab. Pada tahun 2007 ketika perdagangan kedua negara menurun, Jepang mengambil inisiatif untuk menciptakan kerjasama bilateral yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang disebut dengan *Indonesian – Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). IJ – EPA merupakan sebuah kerjasama ekonomi lanjutan dari *Free Trade Agreement* (FTA). Perbedaan antara keduanya adalah IJ – EPA bukan hanya aturan yang mengatur perpindahan barang, namun juga mengatur tentang regulasi – regulasi ekonomi lainnya.¹¹⁷ IJ – EPA berlangsung aktif pada tahun 2008.

Efek dari berlangsungnya IJ – EPA bisa dilihat dari meningkatnya nilai perdagangan antara Jepang dan Indonesia pada tahun 2008. Namun ternyata pada tahun 2009 perdagangan antara kedua negara kembali menurun. Hal ini disebabkan krisis ekonomi dunia akhir tahun 2008 yang terlihat jelas sangat mempengaruhi perdagangan Jepang dan Indonesia.¹¹⁸ Perdagangan kembali meningkat pada tahun 2010.

¹¹⁷ “*Japan Economic Partnership Agreement*” diakses dari http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf pada 19 Desember 2016

¹¹⁸ “Analisa Dampak IJ – EPA terhadap Indonesia dan Jepang” diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf pada 19 Desember 2016

Jika dilihat penjelasan diatas maka dapat dirasakan pasca berlangsungnya IJ-EPA, perdagangan antara Jepnag dan Indonesia meningkat. Namun pada tahun 2009 perdagangan tersebut menurun karena adanya krisis ekonomi, sehingga tidak bisa menjadi acuan bahwa IJ – EPA gagal pada tahun 2009. Pada tahun – tahun berikutnya perdagangan Jepang dan Indonesia terus meningkat.

Pada *ODA Charter* dijelaskan bahwa salah satu motif bantuan ODA diberikan adalah untuk mengenalkan negara berkembang pada perdagangan bebas.¹¹⁹ Seiring bantuan ODA Jepang ke Indonesia, jepang mengenalkan ekonomi yang berbasis pasar tersebut dengan membentuk IJ – EPA. IJ – EPA pun berhasil meningkatkan nilai perdagangan antara Jepang dan Indonesi. Dengan demikian dapat disimpulkan indikator *trade* terpenuhi.

5.2.2 Investment

Hubungan ekonomi antar negara tidak selalu berhubungan dengan perdagangan. Investasi merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh suatu negara. Investasi memiliki keuntungan dua arah, baik dari negara donor ataupun negara penerima donor. Negara penerima donor menggunakan investasi untuk membangun kapabilitas ekonominya. Sedangkan negara donor menggunakan investasi untuk membangun kekuatan ekonomi atau “mengibarkan sayap” di negara lain. Selain itu investasi biasanya juga digunakan sebagai “*carrot*” untuk mengakomodasi kepentingan – kepentingan negara donor di negara penerima.

¹¹⁹ “ODA Charter” diakses dari www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf pada 17 Desember 2016

Dalam melihat ada tidaknya motif ekonomi, Anderson menjelaskan bahwa motif tersebut dapat diukur dari ada tidaknya investasi yang diberikan. Dalam kasus ini, Jika terdapat peningkatan investasi Jepang ke Indonesia seiring bantuan yang diberikan maka indikator *investment* terpenuhi, begitupun sebaliknya.

Investasi juga merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam hubungan bernegara. Pada bantuan Jepang ke Indonesia antara tahun 2008 sampai 2010, investasi juga merupakan salah satu sektor yang diperhatikan. Dibuktikan dengan adanya program *Sixth Development Policy* pada tahun 2009. *Sixth Development Policy* merupakan program Jepang yang didanai dengan bantuan *yen loans* yang berfokus pada peningkatan iklim investasi di Indonesia.¹²⁰

Tabel 5. Nilai Investasi Jepang ke Indonesia tahun 2008 – 2011 (dalam bentuk persen)

Tahun	2008	2009	2010	2011
Nilai	8,528	9,491	11,946	15,816

Data diolah melalui “*Japan External Trade Organization*” diakses dari <https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/>

Jika dilihat tabel diatas maka dapat dilihat pula peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 ke 2009 memang peningkatan sudah terjadi namun selisihnya tidak signifikan. Berbeda dari tahun – tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2009 Jepang secara fokus membentuk program *Sixth Development Policy* untuk

¹²⁰ “*Sixth Development Policy*” diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43211-01-ino-ssa.pdf> pada 19 Agustus 2016

meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Program tersebut dirasa berhasil jika dilihat dari peningkatan investasi Jepang ke Indonesia setelah program *Sixth Development Policy* dijalankan.

Dalam Indikator *investment*, investasi negara donor akan meningkat seiring bantuan ODA kenegara penerima. Dalam penjelasan diatas bisa dilihat bahwa bantuan ODA ke Indonesia pada tahun 2008 sampai 2010 diikuti dengan peningkatan nilai invesatsi dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan indikator *investment* terpenuhi.

5.2.3 Export

Dalam perdagangan internasional terdapat dua jenis kegiatan yang sering disebut yakni ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan suatu negara mengirimkan barang ke negara lainnya. Sedangkan impor sebaliknya, yakni kegiatan mendapatkan barang suatu negara dari negara lainnya. Walaupun demikian, ekspor impor tidak selalu memiliki unsur perdagangan. Perpindahan barang lintas negara sudah termasuk sebagai ekspor maupun impor.

Dalam teori *allocation aid*, Anderson menjelaskan bahwa ekspor merupakan salah satu indikator untuk mengukur *economic*. Ketika suatu negara meningkatkan ekspornya seiring dengan bantuan yang diberikan, maka negara donor tersebut dapat dianggap memenuhi unsur *export* yang telah dijelaskan Anderson. Dalam hal ini, peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia seiring bantuan ODA yang diberikan menjadi tolak ukur terpenuhinya indikator *export*.

Dalam ekonomi internasional, ekspor memperkuat perekonomian negara. Jepang dan Indonesia merupakan negara yang menjalin kerjasama perdagangan bebas yang dikenal dengan IJ – EPA. Kerjasama dalam hal ekonomi tersebut tentunya dapat meningkatkan intensitas perdagangan kedua negara yang mana juga meningkatkan ekspor Jepang ke Indonesia.

Gambar 5.1 Partner Ekspor Indonesia Tahun 2008 (dalam bentuk persen)



Sumber: “*Indonesian Export Partners in 2008*” diakses dari http://www.economywatch.com/world_economy/indonesia/export-import.html

Dari tabel diatas sangat terlihat bahwa Jepang merupakan negara ekspor utama Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan negara lainnya, ekspor Indonesia ke Jepang 100% lebih banyak dari pada ke negara lainnya. peningkatan ini membuktikan kerjasama ekonomi yang dibuat Jepang dengan Indonesia berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke Jepang.

Tabel 6. Partner Ekspor Jepang Tahun 2008 (dalam bentuk persen)

Negara	Singapore	Thailand	Indonesia
Nilai	19,511	20,529	8,528

Sumber: Sumber: “*Indonesian Export Partners in 2008*” diakses dari http://www.economywatch.com/world_economy/indonesia/export-import.html

Jika Jepang merupakan negara ekspor utama Indonesia, ternyata Indonesia bukan merupakan negara ekspor utama Jepang. Tabel diatas menunjukkan bahwa negara dengan nilai paling tinggi di ASEAN adalah Thailand. Posisi kedua di tempati oleh Singapura dan yang ketiga ditempati oleh Indonesia.

Namun jika dilihat dari segi nilai, ekspor Jepang ke Indonesia terus tumbuh antara tahun 2008 – 2010. Data tersebut bisa dilihat dari gambar 5.1 melihat pertumbuhan nilai ekspor tersebut dapat analisa bahwa bantuan Jepang ke Indonesia diiringi dengan upaya Jepang untuk meningkatkan ekspor Jepang ke Indonesia. Upaya tersebut direalisasikan dari IJ – EPA dan program ekonomi lainnya seperti *Sixth Development Policy*. Dan dari data di atas terbukti terjadi peningkatan (kecuali tahun 2009 karena terjadi krisis). Dengan demikian indikator *export* terpenuhi.

5.3 *Strategic Motive*

Strategic Motive berkaitan dengan motif strategis yang ingin dicapai negara donor menggunakan bantuan luar negeri. Bantuan Jepang ke Indonesia juga dinilai mengandung motif strategis. Anderson menjelaskan untuk mengukur motif strategis digunakan empat indikator, yakni *bonding, embassies, security alliance* dan *peace and security*.

5.3.1 *Bonding*

Hubungan antar negara merupakan hal yang “wajib” dimiliki oleh semua negara. Hubungan antar negara secara resmi disebut sebagai hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ini perlu dilakukan untuk menjalin kerjasama diberbagai bidang. Selain itu, hubungan diplomatik juga menjadi simbol “kerukunan bernegara”.

Hubungan antar negara juga berkaitan dengan kebijakan bantuan luar negeri. Biasanya kebijakan luar negeri diikuti dengan berbagai macam kerjasama antar negara donor dengan negara penerima. Hal ini juga didukung dari penjelasan Anderson. Anderson menjelaskan bahwa motif *strategic* dapat dilihat dari adanya hubungan yang meningkat terkait bantuan luar negeri tersebut. Pertemuan yang intens antara pemerintah Jepang dan Indonesia dapat dianggap sebagai peningkatan *bonding* antar negara. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur indikator *bonding*.

Pertemuan – pertemuan antara Jepang dan Indonesia meningkat seiring bantuan yang diberikan Jepang ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan misi *ODA Charter* bahwa bantuan ODA Jepang merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dengan negara – negara penerima, khususnya negara – negara di kawasan Asia.¹²¹ Terjalannya hubungan baik tersebut dapat dilihat dari pertemuan – pertemuan kenegaraan kedua negara. Pada tahun 2008 – 2010 terdapat banyak peristiwa yang mengindikasikan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia.

¹²¹ “ODA Charter” diakses dari www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf pada 17 Desember 2016

Pada awal tahun 2008, PM Yasuo Fokuda dan Presiden Susilo Bambang saling memberikan ucapan tahun baru. Dalam ucapan tersebut masing – masing kepala negara menginginkan hubungan kerjasama yang makin baik dan erat. Kedua negara juga berkomitmen untuk saling membantu dan mendukung dalam mengembangkan kerjasama bilateral yang telah terjalin.¹²² Pada tahun yang sama Jepang dan Indonesia mengadakan pertemuan yang berjudul *Japan – Indonesia Summit Meeting*. Pada pertemuan tersebut Jepang mengapresiasi peran Indonesia dalam mengatasi *climate chang*.¹²³ Masih pada tahun yang sama Jepang dan Indonesia mengadakan pertemuan pertama yang membahas mengenai *Steering Committee on Climate Change*. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai *Climate Change Programs Loan* yang akan dijalankan di Indonesia.¹²⁴

Pada tahun 2009 Jepang menyatakan keprihatinannya atas banyaknya pemboman yang memakan banyak korban. Selain itu pemerintah Jepang juga menyatakan keprihatinannya atas bencana gempa bumi yang melanda kepulauan di Indonesia. Selanjutnya menteri luar negeri Jepang datang ke Indonesia untuk membicarakan bantuan kemanusiaan yang akan diberikan pada para korban bencana alam.¹²⁵ Pada akhir tahun 2009 Jepang dan Indonesia menandatangani bantuan ODA untuk menanggulangi *climate change* dan memperbaiki infrastruktur di Indonesia.

¹²² “Exchange of New Year Messages between Mr. Yasuo Fokuda and Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” diakses dari www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/1/1177110_924.html pada 19 Desember 2016

¹²³ “Japan – Indonesia Summit meeting” diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/7/1181556_1030.html pada 19 Desember 2016

¹²⁴ “The First Meeting for Steering Committee on Climate Change Program Loans” diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/event/2008/11/1184765_946.html pada 19 Desember 2016

¹²⁵ “Visit to the Republic of Indonesia by Mr. Katsuyo Okada” diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/event/2009/10/1196572_1168.html pada 19 Desember 2016

Kelanjutan dari bantuan tersebut dilakukan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 Jepang juga menyatakan simpatinya dan memberikan bantuan pada korban bencana letusan Gunung Merapi.¹²⁶

Melihat penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa hubungan antara Jepang dan Indonesia membaik dari waktu ke waktu. Hubungan yang baik ini salah satunya ditunjukkan dengan bantuan ODA yang intens ke Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator *bonding* terpenuhi.

5.3.2 Embassies

Hubungan antar negara dikatakan sebagai hal utama yang dilakukan untuk *survive* dalam dunia internasional. Suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri melainkan akan menjalin kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, politik dan lainnya. Dalam mewujudkan hubungan diplomatik yang baik suatu negara akan membangun kantor kedutaan di negara lain. Selain sebagai dukungan administrative, kantor kedutaan juga berperan sebagai simbol bahwa hubungan kedua negara terjalin dengan baik.

Kedutaan juga berkaitan dengan kebijakan bantuan luar negeri suatu negara. Ketika negara donor membangun kedutaan di negara penerima maka hal itu dapat dilihat sebagai peningkatan hubungan strategis antara kedua negara. Anderson juga mengkaitkan kedua hal ini. Anderson menjelaskan bahwa ada tidaknya kedutaan dapat

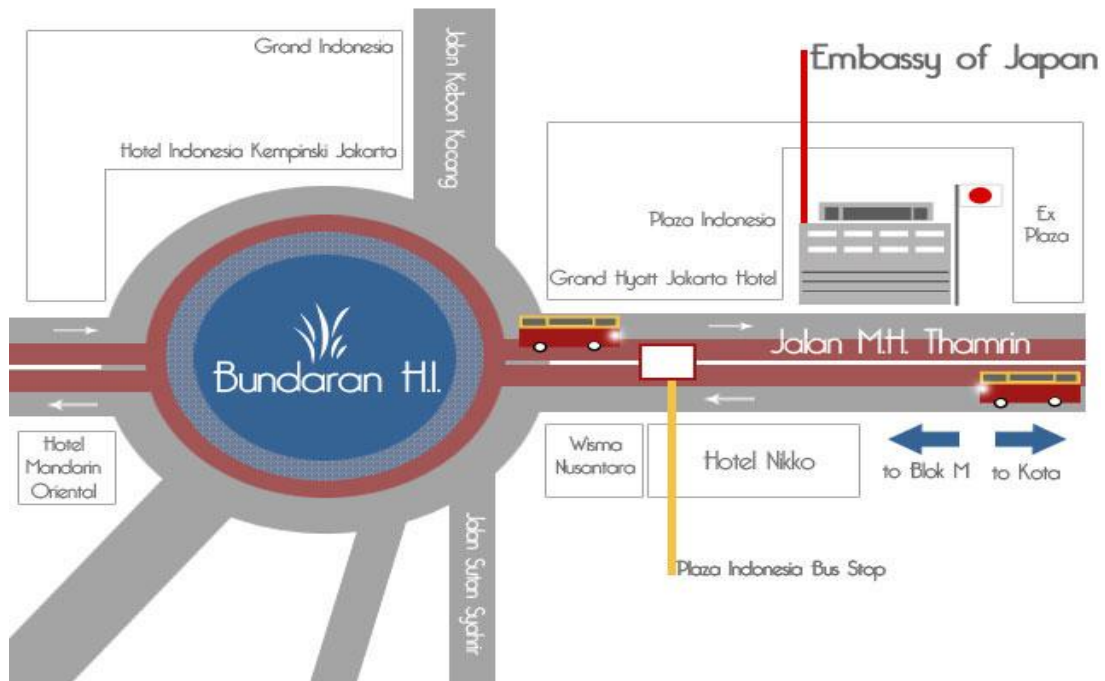
¹²⁶ "Concerning the Earthquake and eruption" diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/10/1027_05.html diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/10/1027_05.html pada 19 Desember 2016

menjadi tolak ukur motif *strategic*. Sehingga jika di Indonesia terdapat kedutaan Jepang, maka indikator *embassies* terpenuhi.

Hubungan diplomatik Jepang di Indonesia yang baik ditunjukkan dengan adanya perwakilan diplomatik Jepang yang berada di Indonesia. Perwakilan diplomatik Jepang ditunjukkan dengan dibangunnya kedutaan Jepang dan beberapa perwakilan konsuler yang menyebar di wilayah-wilayah Indonesia.

Kedutaan Jepang di Indonesia terletak di Jakarta Jl. M.H. Thamrin 24 Jakarta Pusat (10350). Saat ini duta besar Jepang di Indonesia adalah Tanizaki Yasuaki. Kedutaan Jepang di Indonesia ini mengurus mengenai masalah bilateral Jepang dan Indonesia. Selain itu Kedutaan Jepang memiliki website institusi yakni <http://www.id.emb-japan.go.jp>. Website tersebut berisi mengenai program atau proyek yang dilakukan antara kedua negara.

Gambar 5.2 Peta Kedutaan Besar Jepang di Indonesia



Sumber: “Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat “ diakses dari <http://www.id.emb-japan.go.jp/map.html>

Selain kedutaan besar, perwakilan diplomatik Jepang juga diisi oleh konsulat – konsulat yang menyebar di wilayah Indonesia. Terdapat empat konsulat Jepang di Indonesia yakni. Kantor Konsuler Jepang di Makassar yang beralamat di Gedung Wisma Kalla Lantai7 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar, Indonesia. Kantor ini memiliki alamat website <http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/makassar/>. Selanjutnya Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya yang beralamat di Jl. Sumatera No. 93, Surabaya, Indonesia. Kantor ini memiliki alamat website <http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/>. Selanjutnya Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar yang beralamat di Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali,

Indonesia. Kantor ini memiliki alamat website <http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/>. Dan yang terakhir Konsulat Jenderal Jepang di Medan yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza (Wisma BII), 5th floor Jl. Pangeran Diponegoro No. 18, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kantor ini memiliki alamat website <http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/>.¹²⁷

Berkaitan dengan bantuan luar negeri, Kedutaan dan Konsulat Jepang memiliki peran sebagai institusi yang mengawasi langsung implikasi proyek dan program Jepang di Indonesia. Selain itu, website – website resmi tersebut juga berperan sebagai wadah informasi detail dan spesifikasi kerjasama atau bantuan ODA Jepang di Indonesia. Website – website tersebut juga di *maintanace* secara teratur sehingga informasi yang dimuat cukup *update*.

Melihat penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kedutaan dan konsulat Jepang di Indonesia. Kedua institusi tersebut juga berperan aktif dalam mengurus bantuan ODA Jepang di Indonesia. Penjelasan ini juga menekankan bahwa indikator *embassies* yang diukur dari ada tidaknya kedutaan di Indonesia dapat terpenuhi.

5.3.3 Security Alliance

Aliansi militer merupakan kerjasama yang dilakukan negara untuk memperkuat kapabilitas militernya. Pola aliansi militer ini biasanya terjadi karena adanya ancaman yang datang dari negara lain. Ancaman yang datang tersebut akan direspon dengan membentuk suatu aliansi guna mengurangi perasaan tidak aman

¹²⁷ “Wilayah Kerja Konsulat Jepang di Indonesia” diakses dari <http://www.id.emb-japan.go.jp/conind.html> pada 18 Desember 2016.

suatu negara. Hal ini pernah terjadi ketika AS dan sekutu membantu NATO, Rusia juga mengimbanginya dengan membentuk Pakta Warsawa.

Bantuan luar negeri dilihat sebagai instrumen kebijakan luar negeri dalam berbagai bidang, termasuk keamanan. Negara dapat memberikan bantuan yang kemudian bantuan tersebut dilihat sebagai upaya untuk mempengaruhi negara lain agar mau membentuk aliansi. Anderson menyebutkan bahwa aliansi militer merupakan salah satu indikator dari motif *strategic*. Kaitannya dengan bantuan Jepang ke Indonesia, indikator *security alliance* terpenuhi jika Jepang dan Indonesia membentuk aliansi militer.

Jepang merupakan negara yang mencoba muncul kembali sebagai negara yang “cinta damai”. Hal ini seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Jepang adalah negara yang “suka perang” dan ketika kalah perang pada PD II Jepang lebih memilih untuk menjadi negara *pasifis*. Ternyata hal ini juga berpengaruh pada kebijakan bantuan luar negeri Jepang. Pada ODA *Charter* terdapat prinsip ODA yang berbunyi “*Any use of ODA for military purposes or for aggravation of international conflicts should be avoided*”.¹²⁸ Kalimat tersebut menekankan bahwa bantuan ODA memang tidak diperuntukkan untuk militer. Selain itu kenyataan bahwa memang tidak ada proyek Jepang yang mengarah pada aliansi militer membuat analisa tidak adanya motif Jepang dalam hal ini semakin jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator *military alliance* tidak terpenuhi.

¹²⁸ “ODA Charter” diakses dari http://www.id.emb.japan.go.jp/oda/en/whatisoda_05.htm pada 18 Desember 2016

5.3.4 *Peace and Security*

Perdamaian dan keamanan merupakan cita -cita bangsa yang ingin diwujudkan oleh negara – negara didunia. Perang dianggap sebagai penyebab banyak kesengsaraan. Kelaparan, kemiskinan, kematian merupakan dampak buruk dari munculnya perang. Melihat hal tersebut negara – negara di dunia berkomitmen untuk menjaga perdamaian global. Salah satu komitmen tersebut muncul dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) atau *United States* (UN).

Jepang merupakan negara yang pernah menajadi “negara perang” pada Perang Dunia II. Namun pada masa selanjutnya, Jepang mulai merubah *image* tersebut kearah yang lebih positif. Salah satu wujud dari perubahan tersebut adalah *war reperation* yang diberikan kepada negara -negara korban perang. Tindakan tersebut memunculkan anggapan bahwa bantuan ODA yang diberikan Jepang berkaitan dengan upaya Jepang untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan kemananan internasional. Anderson menjelaskan bahwa motif strategis dapat dilihat dari terpenuhinya indikator *peace and security*.

Jepang adalah anggota sementara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa atau disingkat DK PBB. DK PBB sendiri adalah sebuah badan dibawah PBB yang bertanggung jawab untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB memiliki 15 anggota yang masing – masing anggota memiliki satu suara. Suara itu yang nantinya digunakan untuk menentukan *position* negara

dalam pengambilan keputusan.¹²⁹ Jepang dalam menginginkan posisi sebagai anggota tetap DK PBB. ODA Jepang merupakan salah satu cara agar mendapatkan suara atau dukungan dari negara penerima ODA agar Jepang dijadikan sebagai anggota tetap DK PBB. Peristiwa tersebut pernah terjadi pada bantuan ODA Jepang di kawasan *Mekong River Basin Countries* (MRBCs). Bagaimana bantuan tersebut disisipi dengan keinginan Jepang agar *MRBCs* mau memberikan dukungannya kepada Jepang.¹³⁰ Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Machimura Nobutaka yang berbunyi “*Japan has more involved with global affairs in a bid to gain a permanent seat on the UN Security Council. In the process, Japan seeks to rid itself of its “historical baggage” and reconcile the ideologies of the Peace Constitution*”.¹³¹

Namun, pada bantuan ODA Jepang ke Indonesia tahun 2008 sampai 2010, penulis tidak menemukan adanya pernyataan dari Jepang mengenai keinginannya menjadi anggota tetap DK PBB. Bantuan yang diberikan tersebut difokuskan pada ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Dalam pertemuan – pertemuan yang diadakan antar Jepang dan Indonesia pada rentang waktu 2008 sampai 2010 juga tidak ada *statement* dari pemerintah Jepang mengenai keinginannya mendapat dukungan dari Indonesia untuk menjadi DK PBB dan Indonesia pun tidak ditemukan menyatakan dukungannya kepada Jepang terkait keinginannya menjadi anggota tetap DK PBB. Melihat hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa bantuan ODA Jepang ke

¹²⁹ “United States Security Council” diakses dari <http://www.un.org/en/sc/> pada 18 Desember 2016.

¹³⁰ “Ministry of Foreign Affairs: Joint Statement of the Mekong – Japan Summit” diakses dari http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mekong/summit03/joint_statement.html pada 18 Desember 2016

¹³¹ Alasan Jepang Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-124531.pdf> diakses pada 10 Februari 2016

Indonesia tidak disisipi niatan Jepang dalam kaitannya dengan perdamaian dan kemanan internasional. Dengan demikian indikator *peace and security* tidak terpenuhi.

5.4 *Ideology Motive*

Ideology Motive adalah motif – motif ideologi yang dimiliki Jepang berkaitan dengan bantuan Jepang ke Indonesia. Dalam melihat motif ini Anderson menyediakan empat indikator sebagai tolak ukur, yakni *Politics, Values, Democracy* dan *Human Rights*. Masing – masing indikator akan dikonfirmasi pada sub bab berikut,

5.4.1 *Politics*

Politik adalah hal yang sering menjadi alasan suatu negara melakukan kebijakan luar negeri. Secara umum politik diartikan sebagai alat untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Negara – negara menggunakan berbagai macam cara untuk mengakomodasi kepentingan politiknya, salah satunya dengan menggunakan bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri menjadi salah satu alat politik internasional. Selain itu, politik suatu negara juga dapat menentukan atau membuat negara donor memberikan bantuan luar negerinya. Kaitannya dengan ini, Anderson menjelaskan bahwa untuk melihat motif ideologi, indikator *politics* dapat digunakan sebagai tolak ukur. Indikator *politics* tersebut dapat dilihat dari kesamaan sistem politik yang digunakan. Kesamaan sistem politik dapat menjadi motif untuk memberikan bantuan luar negeri.

Begitupun dengan bantuan Jepang ke Indonesia. Jika Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan sistem politik maka indikator *politics* menjadi relevan.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik dominan selain komunis. Dalam perjalanannya demokrasi berhasil mempengaruhi banyak negara. AS merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang menjadi sistem acuan demokrasi. Sistem politik AS secara langsung mempengaruhi negara – negara aliansinya termasuk Jepang. Jepang merupakan salah satu negara asia yang menganut sistem politik demokrasi begitupun juga Indonesia. Namun untuk melihat lebih jauh demokarasi yang dianut kedua negara, akan lebih mudah jika mengkaitkannya dengan prinsip – prinsip demokrasi. Dalam jurnal yang ditulis oleh Paula Becker dan Dr. Jean – Aime A. Raveloson yang berjudul “*what is democracy*” terdapat delapan elemen yang dimiliki oleh negara demokrasi, yakni¹³²

Pertama, *Fundamental Freedom and Fundamental Rights* yaitu HAM merupakan salah satu ciri dari sistem politik demokrasi. Untuk melihat demokrasi Indonesia dan Jepang maka bisa dilihat dari kedua negara tersebut melihat HAM. Hal ini bisa dilihat dari konstitusi kedua negara. Dalam konstitusi Jepang terlihat jelas pada *chapter III Rights and Duties of the people* bahwa Jepang menjunjung tinggi HAM masyarakat Jepang.¹³³ Begitupun Juga dengan Indonesia. Dalam Undang-

¹³² Paula Becker and Dr. Jean – Aime A. Raveloson. 2008. *What is Democracy*. University of Trier. Hal 3

¹³³ *Constitution of Japan*” diakses dari http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html pada 18 Desember 2016

Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia yang juga menjelaskan mengenai perlindungan HAM masyarakat Indonesia.¹³⁴

Kedua yakni, *Election* yang berasumsi bahwa Demokrasi juga dapat dilihat dari adanya pemilu yang dibuat untuk memilih pemimpin dan perwakilan negara. Jepang mengadakan pemilu yang berisi orang – orang dari partai sama dengan Indonesia. Kedua proses tersebut juga terdapat pada konstitusi masing – masing negara

Ketiga, *Rule of Law* yaitu, bagaimana hukum dapat mengatur kebebasan individu di suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebebasan individu Jepang dan Indonesia masing – masing diatur oleh konstitusi mereka. Hal ini membuktikan bahwa kedua negara berkomitmen untuk menegakkan HAM di negaranya masing – masing

Ke empat, *Seperation of Powers* disini maksudnya dalah bagaimana pemerintah membagi kekuasaannya menjadi tiga elemen yakni legislative, eksekutif dan yudikatif. Indonesia dan Jepang sama – sama menganut sistem ini. Sudah tertulis jelas dalam konstitusi.

Ke lima, *Parliaement* dapat diartikan sebagai badan legislatif yang mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di Jepang badan ini dikenal dengan nama *Diet* sedangkan di Indonesia dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Anggota dari masing masing parlemen ditentukan lewat pemilu.

¹³⁴ “UUD 1945” diakses dari <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UUD%201945.pdf> pada 18 Desember 2016

Ke enam, *Democratic Pluralism* yakni bagaimana negara tersebut memiliki suku dan budaya yang bermacam – macam. Jepang memiliki agama yang bermacam – macam. Diversifikasi agama ini menunjukkan adanya kebebasan masyarakat di Jepang untuk menentukan keyakinan mereka. Begitupun dengan di Indonesia, Indonesia memiliki suku, ras, Bahasa dan agama yang bermacam -macam.

Ke tujuh, *The Governnet and the Opposition* maksudnya adalah bagaimana negara tersebut tidak memiliki sistem satu partai. Ketika suatu negara hanya memiliki partai tunggal maka kekuasaan akan cenderung mengarah kediktator tapi jika dengara memiliki multipartai maka bisa dibilang akan lebih demokratis. Jepang merupakan negara dengan multi partai, seperti *Liberal Democratic People (LDP)*, *Liberty Party*, *Social Demokratic Party* dan lain – lain.¹³⁵ Begitupun dengan Indonesia. Indoensia juga menganut multipartai seperti Nasional Demokrat, PDIP, Gerindra, Demokrat dan lainnya.

Ke delapan, *Public Opinion and freedom of the Media* yakni bagaimana kedua negara memberikan transparansi informasi kepada masyarakat lewat kebebasan pers. Jepang dan Indonesia terbuka terhadap arus informasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya masalah dengan media manapun pada tahun 2008 sampai 2010.

Melihat penjelasan-penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa Jepang dan Indonesia adalah negara yang demokratis. pada penjelasan sebelumnya indikator

¹³⁵ “Major Political Parties in Japan” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/japan/japanparties.htm> pada 18 Desember 2016

politics dapat dilihat dari adanya kesamaan sistem politik antara Jepang dengan Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator *politics* terpenuhi.

5.4.2 *Values*

Penyebaran nilai sudah lama terjadi sejak Perang Dunia II. Pada masa tersebut dua negara besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba – lomba untuk menyebarkan nilai yang mereka anut. Penyebaran nilai ini dilakukan untuk membentuk aliansi ataupun kerjasama dengan negara lainnya. Karena semakin mirip nilai yang dianut maka akan semakin mudah dalam menjalin kerjasama. Salah satu instrumen yang populer untuk menyebarkan nilai tersebut adalah dengan menggunakan bantuan luar negeri.

Penggunaan bantuan luar negeri sebagai instrument penyebaran nilai sering digunakan oleh negara – negara maju. Nilai yang disebarkan pun tidak seperti dulu yakni demokrasi atau komunis melainkan lebih pada nilai – nilai secara ekonom seperti nilai – nilai liberal. Anderson menjelaskan bahwa untuk melihat motif *ideology* dapat menggunakan indikator *values*. Artinya, jika dalam bantuan luar negerinya negara donor menyebarkan nilai – nilai liberal yang dianutnya maka indikator *values* terpenuhi. Kaitannya dengan bantuan ODA Jepang ke Indonesia dinilai sebagai upaya unuk menyebarkan nilai – nilai liberal seperti perdagangan bebas.

Seiring dengan bantuan yang diberikan Jepang ke Indonesia, Jepang dan Indonesia membuat perjanjian baru yang dikenal dengan *Indonesian – Japan*

Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang berisi perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia. Kesepakatan ini terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat *WTO plus (World Trade Organization plus)* (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*capacity Building*) sebagai bagian dari *Partnership Agreement* (kemitraan).¹³⁶

Perjanjian ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang mulai aktif pada tahun 2008. Pada tahun 2006 kedua negara tersebut telah mencapai kesepakatan yang meliputi liberalisasi perdagangan dan kerja sama Industri untuk meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008, diadakan pertemuan kerja guna meninjau dan memperbaiki industri tekstil di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009 Jepang meninjau lebih komperhensif mengenai industri tekstil di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir.¹³⁷

Dari Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat keinginan Jepang untuk melakukan dukungan liberalisasi di Indonesia. Seseuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa indicator *values* diukur dari ada tidaknya program atau proyek

¹³⁶ "IJEPA and its effects on Indonesia and Japan Economy" diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf> pada 18 Desember 2016.

¹³⁷ "Perkembangan Industri bilateral berdasarkan EPA" diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news09_06.html pada 18 Desember 2016

Jepang di Indonesia terkait penyebaran nilai liberal. Sehingga dapat disimpulkan indikator *values* terpenuhi.

5.4.3 *Democracy*

Di dunia ini terdapat dua sistem pemerintahan yang dominan yakni demokrasi dan komunis. Dua dominasi ini mempengaruhi aktivitas politik semua negara – negara di dunia. Pasca perang dingin Amerika Serikat atau AS sebagai “bapak” demokrasi menyebarkan nilai – nilai demokrasi keseluruhan negara sekutunya, termasuk Jepang. Jepang menjadi negara yang memiliki hubungan baik dengan AS setelah sebelumnya keduanya bertemu dalam *Colombo Plan*.

Jepang merupakan salah satu negara Asia yang paling gencar memberikan bantuan luar negeri pada negara – negara berkembang. Bantuan ODA tersebut diberikan untuk membantu negara berkembang dalam berbagai sektor. Kaitannya dengan hal ini, Anderson menjelaskan bahwa penyebaran demokrasi merupakan indikator dari motif *ideology*. Dengan demikian jika dalam memberikan bantuannya ke Indonesia, Jepang melakukan kegiatan penyebaran nilai demokrasi atau mendukung penyempurnaan demokrasi di negara berkembang maka indikator *democracy* menjadi relevan.

Jepang merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam menyebarkan nilai demokrasi di dunia. Hal ini dirasa wajar mengingat Jepang adalah salah satu aliansi terdekat AS. Salah satu komitmen tersebut tercantum dalam *ODA Charter* yang berbunyi “*Full attention should be paid to efforts for promoting*

*democratization and the introduction of market-oriented economy, and the situation regarding the protection of basic human right and freedoms in the recipient country.*¹³⁸

Komitmen Jepang tersebut tidak hanya bersifat normatif. Dibuktikan dari bantuan ODA Jepang ke Indonesia yang diiringi dengan program atau proyek demokratisasi. Salah satunya adalah pemberian bantuan hibah total sebesar US\$ 127.878 melalui bantuan hibah berskala kecil (grassroots) kepada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) pada tahun 2009. Dana ini digunakan untuk mengadakan kegiatan pendidikan bagi pemilih dalam rangka PEMILU 2009 (Pemilihan anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota) yang akan datang.¹³⁹

Selain itu, upaya Jepang untuk mendukung demokrasi di Indonesia juga muncul dari datangnya Perdana Menteri Hatoyama pada *Bali Democracy Forum* yang diadakan pada tahun 2009. Kehadiran Perdana Menteri Hatoyama pada Bali Democracy Forum II dilihat secara simbolis untuk menandai hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang, dimana kedua negara yang berbagi nilai-nilai universal antara lain kebebasan dan demokrasi bertekad bekerjasama dalam mengatasi berbagai tantangan yang sedang dihadapi masyarakat internasional. Pada kesempatan ini, Duta Besar Jepang di Indonesia Kojiro Shiojiri telah menyumbangkan tulisan bagi koran

¹³⁸ "ODA Charter" diakses dari www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf pada 17 Desember 2016

¹³⁹ "Bantuan Pendidikan untuk pemilih dalam Menyambut PEMILU 2009" diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news09_04.html pada 18 Desember 2017.

besar di Indonesia mengenai hubungan strategis antara Jepang dan Indonesia ke depan.¹⁴⁰

Melihat hal tersebut dapat diambil pengertian bahwa bantuan ODA Jepang ke Indonesia diiringi oleh motif – motif demokratisasi. Hal ini sesuai dengan *ODA Charter* yang menjadi pedoman bantuan ODA Jepang. Sehingga dapat dikatakan indikator *democracy* dalam bantuan ini terpenuhi.

5.4.4 Human Rights

Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan hak tersebut tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.¹⁴¹ Negara – negara di dunia khususnya yang menganut demokrasi menjunjung tinggi dan bahkan menyebarkan nilai – nilai tersebut kenegara lain. Banyak cara untuk menyebarkan nilai HAM. Salah satunya dengan menggunakan instrument bantuan luar negeri.

Jepang merupakan salah satu negara yang menggunakan bantuan luar negeri sebagai cara untuk menyebarkan nilai – nilai HAM. Anderson juga menyebutkan bahwa untuk melihat motif *ideology* salah satu tolak ukurnya adalah adanya keinginan untuk menyebarkan nilai – nilai demokrasi. Kaitannya dengan bantuan

¹⁴⁰ “Kerjasama Indonesia – Jepang Melalui Demokrasi” diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news09_48.html pada 18 Desember 2016

¹⁴¹ “Hak Asasi Manusia” dikases dari <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf> pada 12 Desember 2016

Jepang ke Indonesia, indikator *human rights* akan relevan jika Jepang seiring bantannya ke Indonesia menyebarkan nilai – nilai hak asasi manusia.

Pada dasarnya bantuan ODA Jepang sesuai dengan *ODA Charter* diberikan pada negara – negara berkembang salah satunya untuk memperbaiki pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Pada bantuan Jepang ke Indonesia pada tahun 2008 sampai 2010, penulis tidak menemukan program yang bertujuan untuk mendukung ataupun memperbaiki HAM di Indonesia. Niat Jepang untuk *mempromote* HAM hanya ditemukan di *ODA Charter* dan tidak direalisasikan pada bantuan tersebut. Melihat hal tersebut, indikator *human rights* yang diukur dari proyek atau program Jepang di Indonesia dianggap tidak relevan atau tidak terpenuhi.

5.5 Identity Motive

Identity Motive berkaitan dengan motif – motif identitas yang ingin dicapai oleh Jepang dalam bantuan ODANYA ke Indonesia. Anderson menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur motif *identity*. Indikator tersebut antara lain *Experiences and Knowledges*, *Political Aims* dan *International Recognition*.

5.5.1 Experience and Knowledges

Pengalaman dan pengetahuan merupakan dasar dari profesionalitas. Begitupun kaitannya dengan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri yang dilakukan dalam waktu yang lama dan terstruktur memunculkan kepercayaan negara penerima. Ketika kepercayaan tersebut muncul maka kredibilitas dari negara donor juga akan naik.

Jepang merupakan negara yang sudah lama fokus pada pemberian bantuan ODA ke negara – negara yang membutuhkan, khususnya negara berkembang. Lama dan terstrukturnya Jepang dalam memberikan bantuan membuat nama Jepang semakin kredibel sebagai negara donor. Anderson menjelaskan bahwa *experience and knowledge* adalah inidkator untuk melihat motif identitas negara donor. Dalam hal ini, inidikator ini akan terpenuhi jika Jepang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam memberikan bantuan ODA ke Indonesia dilihat dari lamanya dan program atau proyek yang telah dibuat.

Bantuan luar ODA Jepang ke Indonesia pertama kali berbentuk bantuan ganti rugi perang yang disepakati Jepang saat *Colombo Plan*. Bantuan tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 1997, Jepang memberikan bantuan yang signifikan agar Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi.¹⁴² Bantuan tersebut kemudian berlanjut dan mengarah pada berbagai sektor.

Pada tahun 2004 ketika Indonesesia mengalami gempa bumi dan tsunami, Jepang juga memberikan bantuan kepada korban – korban bencana tersebut. Bantuan tersebut berupa hibah. Hibah dalam bantuan luar negeri diartikan sebagai bantuan yang dananya resmi dapat digunakan untuk biasanya tujuan – tujuan kemanusiaan dan tanpa perlu dikembalikan ke Jepang.¹⁴³

Selanjutnya pada tahun 2006 Jepang memberikan bantuan luar negeri berupa pembangunan infrastruktur energi. Bantuan tersebut dilakukan agar Indonesia mampu

¹⁴² Kemitraan Setengah Abad Bantuan ODA” dikases dari http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm pada 18 Desember 2016

¹⁴³ Loc.cit

mencukupi kebutuhan energinya.¹⁴⁴ Selain itu Jepang juga mengembangkan energi *geometral* yang dibangun pada tahun 2009. Pembangkit energi baru tersebut diyakini sebagai energi yang efektif dan efisien.¹⁴⁵

Bantuan Jepang ternyata tidak hanya pada sektor – sektor “fisik” semata melainkan juga pada sektor – sektor “non- fisik” seperti *good governance*. Pada tahun 2007 Jepang memberikan bantuan yang mendukung otonomi otonomi daerah di wilayah Indonesia Timur. Sistem ini dilihat sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat demokratis.¹⁴⁶ Selain itu upaya ini juga dilihat sebagai kontribusi Jepang dalam menyebarkan nilai – nilai demokrasi di Asia. Sedangkan pada tahun 2008-2010 Jepang telah melakukan transfer Keilmuan dan Teknologi melalui bantuan ODA terhadap Indonesia yaitu pertama, *Development of World Class University at University of Indonesia* yakni program ODA Jepang daalam memperbarui dan mereformasi pendidikan dalam bidang kesehatan di Universitas Indonesia agar kesehatan di Indonesia membaik.¹⁴⁷ Kedua, *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities* merupakan bantuan dari pemerintah Jepang yang termasuk dalam ODA dalam penanggulangan banjir dan pencegahan di beberapa kota di Indonesia.¹⁴⁸ Ketiga, *Countermeasure for Sediment on Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir* merupakan program serupa yang diberikan oleh pemerintah Jepang

¹⁴⁴ Loc.cit

¹⁴⁵ “Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) untuk Indonesia” diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html pada 18 Desember 2016

¹⁴⁶ “Kemitraan Setengah Abad Bantuan ODA” diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04f.htm pada 18 Desember 2016

¹⁴⁷ “Japanese ODA Loan to The Republic of Indonesia” diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/1178636_990.html pada 6 Februari 2017.

¹⁴⁸ “Japan to Provide Yen Loan Assistance to Indonesia for Five Project” diakses dari http://www.id.emb-japan.go.jp/news09_14e.html pada 7 februari 2017.

melalui JICA terhadap Indonesia. Ke empat, *Development of Bandung Institute of Technology* yakni merupakan program khusus yang diberikan pemerintah Jepang terhadap Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan fasilitas penelitian dan teknologi.¹⁴⁹ Ke lima, *Engginering Service for Java-Sumatra Interconection Transmission Line Project* merupakan bantuan proyek pembangunan dan juga pendampingan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia dalam bidang ke teknikan. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan sistem kelistrikan pulau Jawa dan Sumatra agar terjadinya kestabilan listrik di kedua pulau tersebut. Ke enam, Lumut Balai *Gheothermal Power Plant Project* adalah agenda pembangunan fasilitas mesin no. 1 – 2 Lumut Balai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini muncul dari adanya ide untuk melakukan diversifikasi teknologi pada bidang energi. *Geothermal plant* sendiri memiliki potensi kira-kira 27,000MW yang terbesar di dunia. Dengan ini, diharapkan perbaikan stabilitas *supply* tenaga listrik di Indonesia dan promosi pengembangan energi yang dapat diperbaharui.¹⁵⁰

Selanjutnya bantuan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun sampai saat ini. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, Jepang merupakan negara yang berkomitmen dan konsisten dalam memberikan bantuan di Indonesia. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan di Indonesia.

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*

Dalam indikator *experience and knowledges* negara donor memperoleh kredibilitasnya jika negara donor memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam memberikan bantuan. Dalam memberikan bantuan ODA Jepang juga tidak hanya memberikan pengalaman tetapi Jepang juga menyempikan pengetahuan melalui program-program ODA nya seperti yang telah penulis jelaskan dalam program bantuan ODA Jepang yang bersifat keilmuan yang mampu memberikan transfer keilmuan bagi Indonesia sehingga Indonesia mampu memperoleh dan menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika melihat penjelasan dan program-program ODA tersebut dapat disimpulkan indikator *experience and knowledges* terpenuhi.

5.5.2 Political Aims

Dalam segala bentuk kebijakan luar negeri, suatu negara akan menggunakan kepentingan politiknya sebagai tujuan. Politik merupakan dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam memberikan bantuan luar negerinya, negara donor akan memertimbangkan kepentingan politiknya dan mengakomodasi kepentingan tersebut.

Bantuan ODA Jepang ke Indonesia yang meningkat dan besar dianggap memiliki unsur politik. Anderson menjelaskan bahwa dalam melihat motif *identity*, indikator *political aims* juga dapat dijadikan tolak ukur. Indikator ini akan relevan jika dalam memberikan bantuan ke Indonesia Jepang juga mengakomodasi kepentingan politiknya di Indonesia.

Jepang merupakan negara yang telah mengalami perkembangan pada karakteristik diplomasinya dari masa – ke masa. Dalam sejarah, Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan militer yang kuat. Hal ini dibuktikan di masa perang dunia. Dimana dalam perang tersebut Jepang berani berkonfrontasi dengan negara sekelas AS. Namun setelah perang dunia berakhir dan kehidupan internasional berubah. Jepang mulai beradaptasi dan membentuk citra baru.

Dalam perkembangannya, bukanlah tugas yang mudah bagi Jepang untuk merubah citra baru tersebut kepada masyarakat internasional. Berbagai kecurigaan dan rasa takut muncul dari negara-negara bekas jajahan Jepang akan kembalinya Jepang bertindak seperti pada masa kejayaan militerismenya di masa perangpun merupakan faktor penting sebagai penentu keberhasilan diplomasi Jepang di lingkungan internasional. Untuk merubah itu semua, Jepang mulai membentuk *image* baru sebagai negara *pasiiifis* Salah satu tindakan tersebut ditujukan dari permintaan maaf Perdana Menteri Kaifu yang berbunyi "*I express sincere contrition for past Japanese actions which inflicted unbearable suffering and sorrow upon a great many people of the Asia-Pacific region.*"¹⁵¹

Jepang secara aktif juga mencitrakan dirinya dengan memberikan bantuan ke negara – negara ASEAN. Sebagai negara yang pernah menagalmi kerugian akibat penjajahan Jepang, Jepang mulai menyatakan keinginannya untuk mempererat

¹⁵¹ Sueo Sudo, *The International Relations of Japan and South East Asia (Forging A New Regionalisme)*, Routledge London, 2002, hal. 40

hubungannya dengan negara – negara di ASEAN. Keinginan tersebut tercurah dari Perdana Menteri Kiichi Miyazawa yang menyatakan:

*”Japan will attach particular importance to the very process of talking with the ASEAN countries. This means that Japan will think and act together with ASEAN. I am quite confident that the wisdom and vigor of the ASEAN countries become an important pillar which supports the future of the international community, at a time when the world is searching for a new international order.”*¹⁵²

Dari pernyataan – pernyataan tersebut terlihat bahwa Jepang berkomitmen untuk melakukan menjalin hubungan baik dengan dengan negara – negara di ASEAN. Saat ini hubungan baik Jepang dnegan negara – negara di *ASEAN* terlihat dari bantuan ODA yang intens ke ASEAN. Prinsip tersebut sesuai dengan *ODA Charter* yang menjelaskan bahwa ASEAN merupakan negara prioritas Jepang dalam bantuan ODA. Termasuk di dalamnya Indonesia.

Bantuan luar negeri yang besar di Indonesia salah satunya dilihat sebagai cara untuk memperbaiki *image* Jepang di dunia internasional. Bentuk diplomasi yang dilakukan Jepang ini faktanya diterima baik oleh Indonesia yang sebelumnya pernah dijajah oleh Jepang. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kerjasama – kerjasama yang sebagian besar berupa kerjasama ekonomi antara kedua negara.

Melihat fakta – fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan ODA Jepang ke Indonesia sebagai re presebtasi kebijakan politik dan diplomasi baru Jepang agar dapat diterima sebagai partner dan melupakan kesalahan – kesalahan Jepang di masa lalu. Sengan demikian indikator *politic aims* bisa dikatakan terpenuhi.

¹⁵² Loc.cit

5.5.3 *International Recognition*

Pengakuan internasional dibutuhkan negara untuk bisa beraktivitas dan berhubungan dengan negara lain. Salah satu pengakuan yang paling dasar adalah pengakuan terhadap kedaulatan negara. Negara yang sudah diakui kedaulatannya dapat berperan aktif sebagai entitas yang dapat bergabung dan berpartisipasi dalam kerjasama bilateral, multilateral ataupun bergabung menjadi anggota organisasi internasional.

Bantuan ODA Jepang ke Indonesia diyakini memiliki kaitannya dengan keinginan Jepang diakui di lingkungan internasional sebagai negara yang “cinta damai”. Anderson menjelaskan bahwa indikator *international recognition* dapat dilihat dari adanya keinginan Jepang untuk diakui. Pengakuan tersebut dibutuhkan Jepang untuk mendapat kepercayaan dan memperoleh perannya dalam sistem internasional.

Dalam bantuan ODANYA Jepang memiliki motif – motif tertentu termasuk mendapatkan pengakuan dalam dunia internasional. Keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap DK PBB merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pengakuan tersebut. Tujuan tersebut pernah disampaikan Jepang melalui menteri luar negeri, yang berbunyi “*The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) hoped that this*

*gradual expansion of support would venttually translate into broad acceptance by other UN members that Japan deserved a seat on the council”.*¹⁵³

Dari penjelasan tersebut maka bisa dilihat bahwa secara tersirat Jepang menjelaskan keinginannya untuk diterima sebagai anggota DKK PBB. Selain itu dalam *speech* tersebut juga diperlihatkan bahwa Jepang ingin PBB mempertimbangkan kelayakannya menjadi anggota DK PBB berdasarkan komitmen bantuan ODA Jepang ke seluruh dunia.

Indikator *international recognition* diartikan sebagai motif Jepang untuk mendapatkan pengakuan internasional. Melihat penjelasan diatas maka pemberian bantuan ODA di dunia salah satunya agar diakui oleh PBB, termasuk bantuannya ke Indonesia. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator *international recognition* terpenuhi.

5.6 *Environmental Motive*

Environmental Motive berkaitan dengan motif lingkungan yang ingin dicapai oleh Jepang. Anderson menyediakan dua indikator untuk mengukur motif lingkungan . idnikator tersebut adalah Indikator tersebut adalah *Aid for Better Environment* dan *International Responsibility*. Indikator ini yang nantinya digunakan untuk menganalisa motif *environmental* Jepang melalui bantuan ODA ke Indonesia.

¹⁵³ *Alasan Jepang Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB* diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-124531.pdf> diakses pada 10 Februari 2016

5.6.1 *Aid for Better Environment*

Permasalahan mengenai lingkungan semakin menjadi kesadaran public. Hal ini dibuktikan dari semakin banyaknya diskusi – diskusi dan perjanjian mengenai masalah lingkungan hidup. Selain itu, negara – negara di dunia juga sering membuat aturan dalam agenda menyelamatkan lingkungan. Agenda – agenda tersebut dibuat dengan berbagai bentuk seperti kerjasama antar negara ataupun juga dalam bentuk bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi namun mencakup hampir keseluruhan sektor, termasuk lingkungan. Bantuan ODA Jepang ke Indonesia dinilai salah satunya sebagai alat untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di Indonesia. Anderson menjelaskan penanggulangan lingkungan dapat digunakan untuk mengukur ada tidaknya motif lingkungan. Jika terdapat proyek atau program untuk menanggulangi lingkungan maka bisa dikatakan indikator *aid for better environment*.

Bantuan ODA Jepang seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan menjadi meningkat antara tahun 2008 sampai tahun 2010. Pada tahun tersebut peningkatan juga terjadi pada proyek dan program – program Jepang di Indonesia. Termasuk proyek mengenai lingkungan. Sebenarnya terdapat sudah ada proyek Jepang mengenai lingkungan sebelum tahun 2008, namun pada tahun pada rentan waktu 2008 sampai 2010 tepatnya pada tahun 2009. Jepang kembali memunculkan

proyek barunya yang lebih terstruktur. Terdapat empat proyek utama terkait lingkungan di Indonesia oleh Jepang, yakni

Pertama, *Climate Change Programme Loan (I)* merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam rangka membantu Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Besar biaya yang diberikan pemerintah Jepang adalah US\$ 300 juta.¹⁵⁴

Kedua, *Climate Change Program Loan (II)* adalah program dari Jepang untuk membantu penanggulangan perubahan iklim oleh Indonesia. Melalui program ini pemerintah Jepang membantu menangani perubahan iklim yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Ketiga, *Climate Change Program Loan (III)* merupakan bantuan hibah dalam ODA dari Pemerintah Jepang terhadap Indonesia yang dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi dan pembangunan di Indonesia terutama untuk pembangunan dalam upaya mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca.

Ke empat, *The Forest Preservation Program* merupakan program pelestarian hutan yang di danai dengan pinjaman *yen* dari Jepang. Program ini didasari dari kebakaran hutan dan pembalakan liar di hutan wilayah Indonesia, dimana setiap tahun hutan di Indonesia berkurang sebanyak 2 persen.. Program ini secara spesifik

¹⁵⁴ "Indonesia Dapat Bantuan 300 Juta Dollar Untuk Climate Change" diakses dari <http://www.antarane.ws.com/print/109078/indonesia-dapat-bantuan-300-juta-dolar-untuk-climate-change> pada 5 februari 2017

bertujuan untuk penanggulangan hutan agar dapat meringankan perubahan iklim yang menjadi masalah global.¹⁵⁵

Kelima, *The Program for the Improvement of Capabilities to cope with Natural Disasters by Climate Change* yakni, program yang ditujukan untuk mengatasi bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak kerugian. Oleh Karena itu, proyek yang didanai dengan pinjaman yen ini bertujuan untuk minimalisasi kerugian bencana banjir dengan pemberian bantuan peralatan yang dibutuhkan.

Ke enam, *Denpasar Sewerage Development Project* yang merupakan upaya Jepang untuk membantu Indonesia melalui pemerintah kota Denpasar dalam pengelolaan limbah air dimana Denpasar merupakan jantung dari pulau Bali yang juga sebagai pusat pariwisata. Program ini merupakan upaya dalam menjaga lingkungan.¹⁵⁶

Dari penjelasan dan program-program tersebut dapat dilihat bahwa bantuan ODA Jepang di Indonesia dilakukan dengan mendukung proyek – proyek atau program – program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia. Program dan proyek dalam ODA Jepang tersebut merupakan bukti keseriusan Jepang dalam mengatasi permasalahan lingkungan dunia dengan melihat Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia yang mampu membantu mengurangi pemanasan global yang menjadi isu pada masa tersebut. Hal tersebut juga

¹⁵⁵ “Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) Untuk Indonesia” diakses melalui http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html pada 15 Februari 2017

¹⁵⁶ Ibid

menekankan adanya motif Jepang dalam sektor lingkungan. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa indikator *aid for better environment* terpenuhi.

5.6.2 *International Responsibility*

Tanggung jawab internasional adalah perasaan atau kesadaran suatu negara untuk mengatasi permasalahan tertentu yang menjadi sorotan global. Dalam hal ini masalah lingkungan menjadi salah satu masalah global yang mencuat akhir – akhir ini. *Climate change* dan *global warming* menjadi isu yang umum dan “diamini” sebagai masalah yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama semua negara.

Kaitannya dengan bantuan luar negeri, bantuan luar negeri menjadi salah satu instrument untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa negara donor telah bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam penanggulangan masalah lingkungan global. Anderson menjelaskan bahwa tanggung jawab internasional ini merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat ada atau tidaknya motif lingkungan. Bantuan Jepang yang diberikan ke Indonesia diyakini sebagai salah satu cara untuk menunjukkan pada dunia bahwa Jepang memiliki tanggung jawab internasional terkait lingkungan. Singkatnya, indikator *international responsibility* akan relevan jika dalam pemberian ODA ke Indonesia, Jepang menunjukkan tanggung jawab internasionalnya.

Masalah mengenai lingkungan telah lama dibahas dalam pertemuan – pertemuan internasional. Salah satu pertemuan yang sangat penting dan dianggap sebagai pertemuan yang mencuatkan isu lingkungan menjadi isu global adalah

Konferensi Stockholm. Pada tahun 1972 Konferensi Stockholm diadakan. Konferensi tersebut melibatkan banyak negara terdiri dari negara-negara maju dan negara – negara berkembang.¹⁵⁷ Dihadiri kurang lebih 1200 delegasi dari 114 negara. Konferensi Stockholm menghasilkan Deklarasi Stockholm yang terdiri atas 26 prinsip dan sebuah rekomendasi yang dinamai *Action Plan of 109*.¹⁵⁸

Konferensi Stockholm membahas berbagai permasalahan lingkungan hidup secara komprehensif yakni dari perencanaan dan pengaturan dalam penyelesaian masalah serta identifikasi polusi. Selain itu konferensi ini juga menjadi forum untuk membahas tema-tema atau isu – isu yang penting. Misalnya saja kapabilitas negara yang kurang dalam mengatasi masalah lingkungan. Tujuan utama Konferensi Stockholm adalah mencari pemecahan permasalahan lingkungan melalui kemajuan teknologi. Gagasan ini muncul dan didukung oleh gerakan-gerakan pro lingkungan seperti *Socio Ecologist* dan *Deep Ecologist* dari Amerika Serikat dan *German Greens* dari Jerman yang menekankan bahwa teknologi dapat menanggulangi krisis lingkungan hidup.¹⁵⁹ Secara keseluruhan, setelah Konferensi Stockholm dibuat muncul sebuah pemahaman bahwa dibutuhkan institusi khusus dalam mengatasi kerusakan yang terjadi Karena lingkungan hidup.

¹⁵⁷ ”*Integrating Environment and Development*” diakses dari <http://www.unep.org/GEO/pdfs/Chapter1.pdf> pada 26 September 2016

¹⁵⁸ ”Dinamika Kemunculan Rezim Lingkungan Global dan Politik Lingkungan Hidup Global” diakses dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131877-T%2026745-Kebijakan%20luar-Tinjauan%20literatur.pdf> pada 16 Desember 2016

¹⁵⁹ Caroline Thomas, *The Environment in International Relations*, London: The Royal Institute of International Affairs, 1992, hal.26

Jepang salah satu negara yang *concern* terhadap masalah lingkungan global. Hal itu dibuktikan dengan adanya iniasi Jepang untuk membangun rezim lingkungan yang dikenal sebagai *Protokol Kyoto*. *Protokol Kyoto* dibuat pada tahun 1997. Pendirian rezim ini terjadi setelah dibuatnya konvensi yang menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi gas rumah kaca mereka.¹⁶⁰

Menurut pengertiannya secara umum protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur peserta protokol untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam sebuah protokol, para anggota jelas terikat secara normatif untuk mengikuti aturan-aturan di dalamnya dan biasanya dibentuk untuk mempertegas sebuah peraturan sebelumnya (misalnya konvensi) menjadi lebih detil dan spesifik.¹⁶¹ Sedangkan *Protokol Kyoto* berisi mengenai aturan yang mengatur anggotanya untuk mengurangi emisi berbahaya yang dapat mempercepat terjadinya *global warming* dan memperparah *climate change*. Namun pada kenyataannya banyak negara – negara maju yang tidak menerapkan aturan dari *Protokol Kyoto*. Melihat hal tersebut, Jepang secara pribadi menciptakan komitmen untuk membantu negara – negara berkembang mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Pada tahun 2009, Perdana Menteri Yukio Hatoyama pada pertemuan *United Nations Summit on Climate Change* atau COP 15 yang dihadiri oleh 30 kepala negara dan organisasi internasional mengumumkan keprihatiannya terhadap terhadap

¹⁶⁰ “*Negotiation: Kyoto Protocol*” diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm pada 16 Desember 2016

¹⁶¹ Loc.cit

permasalahan lingkungan global. Tidak hanya sampai disitu, Hatoyama kemudian mengumumkan keinginannya untuk membuat komitmen bersama dalam rangka mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca di dunia. Komitmen tersebut dikenal dengan *Copenhagen Accord*. Dalam *Copenhagen Accord* terdapat 2 poin utama, yang pertama adalah komitmen bersama untuk mengurangi emisi gas karbon di dunia, dan yang kedua adalah adanya keinginan untuk membantu negara berkembang mengatasi permasalahan terkait lingkungan.¹⁶²

Gambar 5.3 Yukio Hatoyama dalam COP 15 tahun 2009



Sumber: “*Prime Minister in Action*” diakses dari http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/actions/200912/18cop_e.html

Mengadopsi *Copenhagen Accord* menjadi kebijakan Jepang, Jepang mengeluarkan dua kebijakan yang pertama adalah *Mid – Term Target* dan yang kedua adalah “*Hatoyama Initiative*”. *Mid – Term Target* adalah kebijakan dalam negeri Jepang yang mengarah pada pengurangan emisi karbon di Jepang. Perdana Menteri

¹⁶² *What we can do to protect the global environment* melalui http://www.mofa.go.jp/policy/environment/pdfs/jp_initiative_pamph.pdf, diakses pada 20 Februari 2016

Yukio Hatoyama mengumumkan bahwa Jepang akan memasang target untuk mengurangi emisi gas karbon sebesar 25 % pada tahun 2020.¹⁶³ Dan yang kedua adalah “Hatoyama Initiative”, “*Hatoyama Initiative*” adalah kebijakan liura negeri Jepang yang bertujuan untuk membantu negara – negara berkembang mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah melanda dan menjadi krisis internasional.¹⁶⁴

Jika dilihat dari penjelasan indikator sebelumnya, dapat dilihat bahwa bantuan ODA Jepang mengenai masalah lingkungan memiliki kaitan dengan *Hatoyama Initiative*. *Hatoyama Initiative* merupakan komitmen Jepang secara *personal* mengenai permasalahan lingkungan. Komitmen tersebut kemudian menjadi tanggung jawab Jepang sebagai negara maju. Bukan hanya komitmen saja, tanggung jawab ini kemudian diimplementasikan dengan memberikan bantuan ke Indonesia. Dengan demikian indikator *international responsibility* menjadi relevan karena terbukti bahwa bantuan ODA ke Indonesia memiliki motif tanggung jawab internasional Jepang terkait masalah lingkungan.

¹⁶³ *Ministry of Foreign Affairs: Japan's Official Development White Paper 2009* melalui http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2009/html/honbun/b1/s3_1.html diakses pada 20 Februari 2016

¹⁶⁴ *What we can do to protect the global environment* melalui http://www.mofa.go.jp/policy/environment/pdfs/jp_initiative_pamph.pdf. diakses pada 20 Februari 2016